



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 44 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI  
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ)  
TAHUN 2018**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2018.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2018.

KESATU : Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;

KETIGA : Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN STATUS  
TERDAFTAR PROGRAM  
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI  
KEAHLIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI  
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN  
2018

NOMOR : 44 TAHUN 2018  
TANGGAL : 23 APRIL 2018

**DAFTAR PENETAPAN STATUS  
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI LPP PBJ TAHUN 2018**

No.	Nama Lembaga	Kabupaten/Kota Provinsi	Penanggung Jawab
1.	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan	Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bagian Diklat RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Kementerian Kesehatan
2	Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita	Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta	Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO